

BENTURAN NARASI DAN IDEOLOGI IRAN-ISRAEL DALAM TEORI SOSIAL BARAT DAN KONSEP ISLAM

Zaenal Abidin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Zaenal.abidin17@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

The Iran-Israel conflict is one of the most complex and potentially destabilizing geopolitical disputes in the Middle East, rooted in macro-injustice, humanitarianism, power struggles, religious ideologies, and deep historical mistrust. This scientific article seeks to analyze the dynamics of this conflict through the perspectives of Western and Islamic social theories. This research examines how Western theoretical frameworks, as well as Islamic concepts and paradigms and values, provide different understandings of the root causes of war conflicts. The analysis shows that while Western theories often emphasize power calculations, state security, the structure of the international system, and identity, Islamic social theories place a strong emphasis on religious identity, balanced power, theological perspectives on justice, and humanity.

Keywords: *Islamic Concept, Western Theory, Justice, Humanitarian, Security, Power.*

Abstrak

Konflik Iran-Israel merupakan salah satu perseteruan geopolitik paling kompleks dan berpotensi destabilisasi di Timur Tengah, mengakar pada tidak-adilan makro, kemanusiaan, persaingan kekuasaan, ideologi keagamaan, dan ketidakpercayaan historis yang mendalam. Artikel ini ingin menganalisis dinamika konflik ini melalui perspektif teori-teori sosial Barat dan Islam. penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka teoretis dari barat serta konsep dan paradigma, nilai Islam memberikan pemahaman yang berbeda tentang akar penyebab konflik perang. Analisis menunjukkan bahwa sementara teori Barat sering menekankan kalkulasi kekuasaan, keamanan negara, struktur sistem internasional, identitas sementara konsep-konsep sosial Islam menempatkan penekanan kuat pada identitas keagamaan, kekuasaan yang seimbang, perspektif teologis tentang keadilan, dan kemanusiaan.

Kata Kunci: *Konflik, Iran, Israel, Teori Sosial Barat, Teori Sosial Islam.*

Latar Belakang Masalah

Konflik antara Republik Islam Iran dan Negara Israel mewakili fokus ketegangan utama di Timur Tengah, yang melampaui perselisihan bilateral untuk mencakup dimensi regional dan global. Persaingan ini mencakup persaingan kekuasaan regional, perbedaan ideologis yang mendalam (Zionisme vs. Revolusi Islam), masalah keamanan eksistensial, dukungan Iran terhadap kelompok proxy seperti Hizbullah dan Hamas, serta campur tangan kekuatan eksternal (terutama AS). Konflik ini memiliki potensi tinggi untuk memicu eskalasi militer skala besar dengan konsekuensi global yang menghancurkan (Cronin2021; Ehteshami & Zweiri 2021).

Konflik peperangan tidak hanya meninggalkan penderitaan, korban dan kerusakan di kedua belah pihak yang bertempur tapi juga menanggalkan jejak jejak kemanusiaan dalam level individu dan sosial. Perang Iran-Israel bisa dilihat sebagai fenomena sosial yang bisa menyingkapkan motif-motif paling dalam dan paling kompleks dari sebuah bangsa. Teori sosial tidak bisa mengikuti ideal positivitis-objektif, atau asas bebas nilai. Masyarakat penuh dengan ketidakadilan, dan diatur oleh tindakan rasional. Teori sosial harus mengevaluasi secara kritis masyarakat dari perspektif nilai tertentu. Kritik ini mengadili tingkat kebebasan masyarakat sehingga bagi anggota-anggotanya mendorong ke arah pembebasan, perubahan, dan kemajuan. Apa yang diyakini sebagai perjuangan untuk mendapatkan *promise land* (tanah yang dijanjikan). Konsep *promise land* Israel khususnya yang berkaitan dengan Israel mengalami evolusi secara signifikan seiring waktu. Berawal dari Perjanjian Lama, janji tanah kepada Israel dipandang sebagai anugerah Ilahi yang bergantung pada kepatuhan bangsa Israel terhadap perjanjian-perjanjian Allah. Janji ini bukan sekadar warisan fisik, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan etika. Dalam wacana teologis kontemporer, pemahaman tentang Tanah Perjanjian telah ditafsirkan ulang, terutama berdasarkan ajaran-ajaran Perjanjian Baru dan kerangka teologis Kristen yang lebih luas.

Yang terjadinya sebenarnya adalah perang defensif Iran terhadap agresor Israel. Karena para jenderal dan ilmuwan Iran itu dibunuh oleh Israel. Israel juga mengirimkan mata-mata ke wilayah Iran. Sehingga perang tak terelakkan. Selain itu Iran memang konsisten membela Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nasser Kanaani mengatakan

“Barbarisme dan kebrutalan rezim Zionis di Jalur Gaza terus berlanjut di depan mata dunia, dengan badan-badan internasional tetap pasif, dunia berbicara tetapi belum mengambil tindakan.”

Dia menambahkan: “Sejak dimulainya perang di Gaza, 31.923 warga Palestina telah terbunuh dan 74.096 orang terluka, dengan lebih dari 72% korbannya adalah wanita dan anak-anak. Salah satu perkembangan yang menyedihkan adalah pengepungan Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza oleh orang-orang Palestina. tentara pendudukan Zionis selama empat hari berturut-turut. Pagi ini, tentara dari rezim ini meledakkan dan menghancurkan sebuah klinik khusus di Rumah Sakit Al-Shifa.” Kanaani mengungkapkan rasa frustrasinya: “Kata-kata tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan kebrutalan yang tidak masuk akal ini di hadapan komunitas global.” “Para pendukung dan mereka yang tetap diam dalam menghadapi kebrutalan seperti ini seharusnya merasa malu,” lanjutnya, seraya menambahkan: “Komunitas internasional harus bertindak cepat untuk membebaskan PBB dan Dewan Keamanan dari penyanderaan Amerika Serikat dan rezim Zionis.”

Perang Iran dalam konflik Israel-Palestina telah menjadi subjek perdebatan yang intens (Mikail n.d.) Iran secara konsisten menyatakan dukungan kuatnya terhadap perjuangan Palestina dan mengecam tindakan agresi Israel terhadap warga Palestina. Iran secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-hak mereka yang sah, termasuk kemerdekaan dan kembali ke tanah air mereka. Negara ini secara rutin mengecam tindakan represif Israel terhadap warga Palestina, baik di Tepi Barat, Gaza, maupun di wilayah pendudukan lainnya (Tengah et al. 2011).

Perang antara Iran dan Israel bukan sekadar perang ideologi atau perang teologi, tapi perang demi keadilan sosial dan hak-hak asasi kemanusiaan atau demi mengenyahkan unsur penjajahan di muka bumi. Perang ini tapi juga bisa dilihat sebagai fenomena sosial sehingga bisa didekati oleh ilmu sosiologi. Teori sosial umumnya lebih tua dibandingkan dengan sosiologi itu sendiri. Sumber teori ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab seperti Perjanjian Lama, Weda Hindu, serta karya-karya dari Tiongkok. Bahkan, konsep-konsep sosial yang relevan dengan ilmu sosial modern memiliki akar yang bisa dilacak hingga 2400 tahun lalu di Athena kuno.

Teori-teori tersebut berfungsi sebagai alat untuk memahami dunia sosial agar kita dapat memperoleh wawasan yang praktis tentangnya (Caplow 1971). Meski begitu, sosiologi modern, yang mempelajari masyarakat, baru muncul setelah metode ilmiah diterapkan pada ranah sosial. Ini dimulai pada awal abad ke-19 saat muncul usaha terstruktur untuk mengembangkan ilmu tentang masyarakat sebagai sudut pandang yang berbeda dari disiplin lain seperti filsafat, sejarah, politik, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya (Cotgrove 1967). Namun, usaha untuk menjadikan ilmu masyarakat memiliki identitas yang unik melibatkan pengembangan berbagai teori mengenai sifat sistem sosial dan cara belajarnya. Untuk mencapai tujuan ini, para sosiolog menciptakan banyak teori.

Tentu fenomena sosial harus mulai dengan mendokumentasi fakta fakta sosial dan membacanya dengan kerangka ilmu ilmu sosial. Dalam fakta sosial bisa dideteksi adanya kecenderungan individu untuk mengubah perilaku atau keyakinan agar sesuai dengan norma kelompok. Sikap negatif (prasangka) dan perilaku tidak adil (diskriminasi)

terhadap anggota kelompok tertentu. Perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Fenomena di mana keinginan untuk menjaga keharmonisan dalam kelompok mengalahkan penilaian realistis terhadap alternatif tindakan. Faktor-faktor yang membuat seseorang merasa tertarik atau suka pada orang lain.

Sebagian orang melihat fenomena konflik Iran-Israel untuk apokaliptisme, yaitu pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Tanda tanda kehancuran total dunia adalah terjadinya peperangan yang mendalam antara dua kubu penting di dunia. Sebagian melihatnya sebagai fenomena politik internasional memperebutkan hegemoni dan sebagainya. Tapi itu perspektif yang mengandung aroma yang disebut dengan teori konspirasi yang tidak layak disebut teori ilmiah, analisis akademis menolak simplifikasi fenomena kompleks menjadi narasi eskatologis belaka (Huda & Qodir 2022).

Teori Keamanan Regional Stability Complex (RSC)

Menurut teori ini bahwa satu negara dalam satu kawasan itu saling berhubungan tak terpisahkan dari sisi keamanan teori ini menekankan pentingnya memahami siklus keamanan di tingkat regional serta bagaimana suatu negara saling terhubung dengan negara lain dalam dimensi militer politik ekonomi sosial dan lingkungan. Dalam hal ini apakah Iran terhubung secara militer dengan Israel. Iran adalah negara yang aman negara yang tidak bergantung kepada negara lain khususnya kepada Israel Iran hanya ingin membantu atau memberi pelajaran kepada negara penjajah agar tidak sewenang-wenang melakukan kejahatan-kejahatan militer terutama terhadap kelompok-kelompok

yang tertindas di Palestina. Iran sekarang negara yang tidak pernah dijajah dan tidak punya hutang luar negeri. (Daiber, 2013)

Teori Fungsionalisme

Teori yang kedua yaitu teori fungsionalisme. Perang sebagai instrumen sosial itu dipandang dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap keteraturan sosial. Jadi perang seperti yang dilakukan Iran sebagai bentuk pembalasan itu untuk melakukan terapi *shock* bahwa Israel tidak boleh sewenang-wenang. Israel telah mengancam keamanan keteraturan sosial yang ada di Timur Tengah ini. Imam Khomeini menyatakan bahwa Israel adalah kanker yang akan menggerogoti keamanan dan ketenteraman dunia. Karena itu, perang sebagai bentuk pembelaan harus dilakukan demi menjaga keamanan global dan internasional, meskipun menuntut alokasi anggaran besar serta pengorbanan jiwa pasukan sendiri. Namun, demi tujuan dan maslahat yang lebih besar, hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Pandangan ini sejalan dengan praktik pada masa Rasulullah saw., ketika perang juga menjadi tindakan yang disetujui bahkan diikuti langsung oleh beliau (Shamsudin & Idris 2013).

Momentum ini membuktikan bahwa hakikat dari perjuangan tersebut adalah pembelaan dan perlawanan diri demi satu tujuan mulia: menyelamatkan rakyat Palestina di Gaza. Namun, dampaknya melampaui yang dibayangkan. Muncul kekuatan baru yang tak terduga sebelumnya—kekuatan Iran—yang menggugah semangat patriotisme dan menumbuhkan kesadaran identitas kolektif umat, sekaligus mengokohkan kemuliaan Islam di mata kaum muslimin. Perlu diingat, Iran memanfaatkan setiap bentuk peperangan—baik perang dingin maupun perang langsung—sebagai

sarana untuk mendorong inovasi teknologi. Embargo yang semula dimaksudkan untuk melemahkannya justru menjadi pemicu bagi kemajuan teknologinya.

Teori Perebutan Kekuasaan

Teori ini mengatakan bahwa perang adalah ajang perebutan kekuasaan. Israel memang berperang ingin merebut kekuasaan, merebut teritorial, menghegemoni kawasan sekitarnya agar bisa mengikuti impiannya. Tapi bagi Iran perang bukan sekadar untuk merebut kekuasaan. Iran tidak berambisi merebut kekuasaan dalam arti material kecuali untuk kebenaran karena kekuasaan di tangan muslimin akan digunakan untuk hal-hal yang benar yang bijak dan untuk kepentingan masyarakat luas. Tuduhan bahwa Iran ingin mendominasi kawasan regional yang katanya dikhawatirkan oleh negara-negara Arab itu menurut itu hanyalah asumsi politik semata. Iran tidak ingin menguasai kawasan. Iran hanya ingin menciptakan pertama-tama yaitu kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan itu harga mati selain itu juga adalah kemuliaan bagi kaum muslimin (Daiber 2013).

Namun, perlu diperhatikan apa yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis. Pasca Perang Ukraina, ketika Ukraina berupaya membangun kembali negerinya, negara-negara Barat justru memperoleh keuntungan besar melalui proyek-proyek pembangunan dan ekspansi ekonomi. Fenomena ini dapat dibaca sebagai bagian dari medan kompetisi kapitalisme global, di mana konflik dan rekonstruksi pascaperang menjadi instrumen untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politik dunia Barat.

Teori Simbolik Interaksionisme

Teori ini melihat bagaimana makna sosial dibentuk selama konflik ini terjadi. pemimpin seringkali menggunakan simbol-simbol ini nah interaksi simbolisme ini kalau dalam teori ilmu sosial adalah ini adalah teori mikro. Masyarakat Iran sangat kreatif dalam membuat simbol baik dalam bentuk lukisan, huruf, musik, syair dan sebagainya. Simbol memiliki makna yang kuat di kalangan masyarakat luas lewat simbol itu dikokohkan relasi kekuasaan spiritual dalam masyarakat Iran. Simbol memiliki fungsi yang sangat penting. Simbol di kalangan masyarakat yang rasionalis Iran itu membantu mengefektifkan komunikasi dari tingkat elit sampai tingkat bawah (Nugroho & Tengah 2014).

Iran secara konsisten menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata bertujuan damai dan bersifat sipil. Teknologi nuklir dipandang sebagai instrumen strategis yang sangat penting bagi Iran, karena penguasaan terhadap teknologi ini tidak hanya meningkatkan kemandirian nasional, tetapi juga memperkuat status dan citra kekuatan Iran di mata dunia. Selain itu, kemampuan nuklir digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar Iran dalam arena negosiasi internasional, sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kekuatan Israel yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Teori-teori tatanan sosial yang dibahas oleh sosiolog dan antropolog Barat didasarkan pada paradigma filosofis dan konteks geografis mereka. Teori-teori tatanan sosial ini terbatas dalam jangkauan mata manusia, sehingga menggarisbawahi pengetahuan wahyu dan ajaran-ajaran Islam kontemporer lainnya. Para ulama ini tampak saling mengkritik karya satu sama lain, membuka pintu bagi interpretasi yang lebih baik berdasarkan ayat-ayat Al-

Qur'an dan hadis dan meyakini bahwa teori-teori sosiologi dan antropologi Barat tidak lengkap dan membutuhkan pembahasan di luar ranah manusia. Artinya, hanya pengetahuan wahyu yang dapat menjelaskan urgensi tatanan sosial. Teori yang paling tepat untuk membaca masyarakat Islam adalah teori teori yang mengapresiasi keagamaan masyarakat Muslim. Para sarjana muslim menyebutnya konsep (Wiktorowicz 2002).

Konsep Ummah dan Solidaritas Islam

Ali Syari'ati menjelaskan bahwa ummah berasal dari bahasa arab yang artinya bermaksud, menghendaki dan berniat keras. Makna ummah tersebut mempunyai tiga makna, yaitu: gerakan, tujuan, dan ketetapan hati yang sadar. Konflik ini sering dibingkai dalam konteks yang lebih luas tentang pembelaan Ummah (komunitas global Muslim) dan tanah Islam, terutama Palestina/Al-Quds (Yerusalem) (Ramadan 2003). Dukungan Iran terhadap Palestina (Hamas, Jihad Islam) dan Hizbullah di Lebanon dipandang sebagai wujud tanggung jawab Islam terhadap penindasan terhadap Muslim dan pendudukan tanah Muslim (Khatib 2011). Ini membedakan pandangan Islam dari pendekatan negara-bangsa Barat yang ketat.

Menurut M. Quraish Shihab, masyarakat adalah kumpulan individu yang terikat oleh satuan, adat, ritus atau hukum, dan hidup bersama. Menurut Ali Syari'ati, yang dikutip oleh Nanih Machendrawaty, Masyarakat Islam adalah Ummah, yaitu masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan. Ummat dipandang sebagai persaudaraan masyarakat muslim. Yaitu komunitas yang dipersatukan kesamaan agama/din, yang didasarkan

atas kesamaan keyakinan (tauhid), 'ilm dan keadilan sebagai tujuan hidup untuk memenuhi kewajiban sebagai pengemban amanah (khalifatullah).

Konsep Jihad

Jihad dan Perlawanan : Konsep Jihad, terutama sebagai perjuangan defensif melawan agresi dan pendudukan, menjadi pusat dalam narasi Iran dan kelompok pendukungnya (Bonney 2004). Perlawanan bersenjata terhadap Israel dibingkai sebagai jihad yang sah untuk membebaskan tanah yang diduduki dan melindungi yang tertindas. Istilah perlawanan menjadi kunci dalam wacana politik Iran dan sekutunya, memberikan legitimasi religius pada perjuangan mereka (Louër 2021).

Interpretasi ini bertentangan dengan pandangan Barat yang sering mengkategorikan kelompok tersebut sebagai teroris. Konsep Jihad tidak lepas dari konsep politik *Wilāyat al-Faqīh*. Seorang memiliki otoritas untuk memerintahkan Jihad sebagai seruan umum kepada para pengikutnya sehingga menjadi perintah yang mengikat, karena wali fakih adalah representasi imam ideal yang dinantikan. Hadis hadis juga menjelaskan tentang akan kemunculan sang mesiah ini yang diyakin oleh semua agama samawi, baik kristen maupun Islam. Yang membangkitkan semangat jihad juga adalah sejarah para imam yang banyak dibunuh dan juga yang tidak kalah heroik adalah perjuang imam Husein untuk melawan kezaliman. Perjuangan imam Husein yang sangat menginspirasi dunia dan terumata Iran untuk bertahan dalam situasi apa pun dan komitmen membela kebenaran sekalipun kalah.

Konsep *Wilāyat al-Faqīh*

Teori politik Iran pasca-Revolusi 1979 memberikan otoritas tertinggi kepada Faqih (ahli hukum Syiah) dalam urusan negara dan Ummah. Pandangan Faqih (terutama Ayatollah Khamenei) tentang Zionisme sebagai bentuk penjajahan yang tidak sah dan ancaman terhadap Islam secara langsung membentuk kebijakan luar negeri Iran yang anti-Israel (Ansari 2012; Sabet 2012). Kebijakan ini dilihat tidak hanya sebagai strategi nasional tetapi juga sebagai kewajiban agama berdasarkan interpretasi Syiah. Konsep *Wilāyat al-Faqīh* membedakan diri dari konsep hukumah Islamiyah. Konsep *Wilāyat al-Faqīh* adalah ijtihad Imam Khomeini yang terus dihidupkan kembali di Iran karena pemahaman atas situasi yang menuntut adanya otoritas yang absah dan memiliki legitimasi dengan dasar nash dan rasio serta kebutuhan zaman untuk mematuhi otoritas representatif dari Imam Mahdi yang ghayb.

Pertanyaan yang sering disinggung di kalangan sarjana politik adalah apakah *Wilāyat al-Faqīh* akan menjadi otoriter atau menjadi totalitarianisme atau anti demokrasi. Menurut Mahmud Haydar jurnalis dari libanon, terma demokrasi adalah istilah yang muncul setelah perang kedua dan kemudian di sebarakan sebagai alat untuk menghegemoni negara dunia ketiga (Ibrahim, 2011). Dalam *Wilāyat al-Faqīh* terhimpun konsep teo dan krasi yaitu hukum hukum Tuhan yang diinterpretasikan oleh seorang wali yang bisa beiringan dengan hukum hukum positif. Dalam kenyataan di Iran pemilihan umum berlangsung secara demokratis, transparansi dan akuntabilitas.

Masyarakat Iran memiliki wakil wakil yang mereka di DPR , presiden dengan kabinetnya. Para ulama juga dipilih oleh rakyat untuk duduk di majlis ruhaniawan yang bertugas

diantaranya memilih atau menurunkan wali fakih. Konsep Wali fakih juga bisa individual dan bisa kolektif. Proses seleksi oleh majelis ulama menciptakan sebuah sistem meritokrasi keagamaan dan hukum yang ketat. Ini berbeda dengan pemilihan populer yang seringkali mengedepankan retorika populist dan kharisma pribadi.

Kewenangan majelis untuk *menurunkan* Wali Fakih merupakan mekanisme *check and balance* yang sangat powerful. Ini mencegah absolutisme dan memastikan akuntabilitas pemimpin tertinggi. Dalam studi perbandingan hukum ketatanegaraan, Akbarzadeh dan Barry berargumen bahwa mekanisme semacam ini, meskipun unik, menyediakan penyelamat konstitusional yang vital. Ia menciptakan sebuah “pengadilan tinggi” politik yang bertugas menjaga keselarasan kepemimpinan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip agama (Akbarzadeh & Barry 2021).

Fiqh Siyasi (Hukum Internasional Islam)

Tradisi hukum Islam ini membahas hubungan antara Dar al-Islam (Wilayah Islam) dan Dar al-Harb (Wilayah Perang), serta aturan perang dan perdamaian. Pandangan Iran dan sekutunya tentang legitimasi perlawanan terhadap Israel sering kali ditarik dari kerangka ini, terutama mengenai pembelaan terhadap tanah yang diduduki dan orang-orang yang tertindas (Zarabozo 2005; Afsaruddin 2013). Diskusi tentang penggunaan senjata nuklir dalam Islam (dilarang dalam pandangan mayoritas ulama karena melanggar prinsip proporsionalitas dan demi melindungi warga sipil) juga relevan dalam konteks program nuklir Iran (Hashmi & Lee 2004) untuk perdamaian. Wali fakih

juga melarang membuat senjata nuklir yang bisa digunakan untuk kepentingan militer

Konsep Wilāyat al-Faqīh di Iran merupakan prinsip fundamental yang mendasari sistem politik negara tersebut. Ditetapkan oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini setelah Revolusi Iran tahun 1979. Doktrin ini dilembagakan dan melegitimasi kekuasaan ulama atas negara. Doktrin ini diabadikan dalam hukum dengan pembentukan Republik Islam dan telah memainkan peran penting dalam membentuk pemerintahan Iran (Saffari 1993).

Wilāyat al-Faqīh melibatkan gagasan bahwa seorang ulama senior Islam, atau faqih, menjalankan kendali komprehensif atas negara. Otoritas politik ini didasarkan pada legitimasi ilahi yang menciptakan perpaduan unik antara struktur teokratis dan demokratis dalam model pemerintahan Iran. Majelis Ahli, suatu badan ulama, bertanggung jawab untuk memilih Pemimpin Tertinggi, yang merupakan perwujudan Wilāyat al-Faqīh dan memegang otoritas politik dan agama tertinggi (Ghobadzadeh & Rahim 2016).

Sistem ini telah menghadapi perdebatan dan tantangan internal, terutama terkait keseimbangan kekuasaan antara doktrin agama dan prinsip-prinsip demokrasi. Para pemikir pembangkang dalam kerangka Islam telah berupaya memperkenalkan tatanan politik yang lebih pluralistik dan berbasis hak asasi manusia yang dapat menggabungkan perbedaan pendapat dan kebebasan sipil, menantang pemerintahan ulama yang warisan Imam Khomeini. Upaya mereka membuahkan beberapa reformasi, meskipun reformasi ini seringkali ditentang oleh kaum konservatif (Mir-Hosseini & Tapper 2006).

Lebih lanjut, prinsip Wilāyat al-Faqīh tidak

hanya memengaruhi politik dalam negeri tetapi juga memperluas dampaknya ke luar batas-batas Iran, terutama memengaruhi entitas seperti Hizbullah di Lebanon. Hizbullah mengintegrasikan *Wilāyat al-Faqīh* ke dalam kerangka politiknya, menggunakannya untuk memperkuat basis agama dan politiknya di antara komunitas Syiah (Harb & Leenders, 2005). Meskipun konsep *Wilāyat al-Faqīh* tetap menjadi pusat lanskap politik Iran, konsep ini terus memicu diskusi dan perdebatan mengenai hak kewarganegaraan, pemerintahan, dan peran otoritas agama dalam kehidupan publik (Khodadadi 2024).

Keadilan dan Penindasan

Narasi Islam menekankan ketidakadilan pendirian Israel (Nakba) dan penindasan (Zulm) berkelanjutan terhadap rakyat Palestina sebagai inti moral konflik. Perjuangan melawan Israel dibingkai sebagai perjuangan untuk menegakkan keadilan, yang merupakan nilai sentral dalam Islam (Esposito 2010). Pandangan ini memberikan motivasi moral yang kuat yang melampaui kalkulasi kekuasaan semata.

Ini adalah konsep humanisme filsafat Islam yang menyatakan bahwa kita harus berusaha memelihara aspek kemanusiaan kita sebelum menjadi binatang. Dikatakan bahwa seseorang mungkin tidak bisa lagi mendapatkan kebebasan di pentas politik ini karena dia selalu dipengaruhi oleh lingkungannya dan latar belakangnya sejarah, ideologi dan kepentingan politik, tapi yang tidak boleh hilang adalah kemanusiaannya apakah dia masih bisa mempertahankan kemanusiaan atau tidak.

Menjaga kewarasan dan kesadaran untuk menjadi tetap manusia itu sangat sulit karena itu dalam konflik

dalam perang pun Iran sangat hati-hati sangat menjaga aspek kemanusiaan seperti keadilan dan kehormatan dan hak asasi manusia.

Meskipun Iran memiliki persenjataan nuklir, memiliki fasilitas senjata-senjata yang canggih tapi Iran tidak membabi buta. Iran selalu berhati-hati. Sebagian pengamat melihat sepertinya Iran ragu atau ada masalah internal di kalangan mereka padahal yang sesungguhnya terjadi adalah Iran selalu berhati-hati mempertimbangkan segalanya. Dalam ketenangan kemanusiaan itu menjadi hidup karena ketenangan itu identik dengan dominannya sisi rasional di atas sisi kebinatangan. Marah, benci, agresif dan ekstrim adalah karakter teroris atau karakter pemimpin yang ambisius seperti Donald Trump.

Teori Realisme.

Teori realisme klasik berfokus pada sifat dasar manusia yang mementingkan kekuasaan dan keamanan kemudian tercermin dalam perilaku negara. Negara harus mengikuti etika, negara adalah representasi dari etika individu-individu sosial. Pada kenyataannya memang manusia itu menginginkan kekuasaan karena kekuasaan itu merupakan aktualisasi dari daya-daya. Ada dua fakultas dalam diri manusia yaitu ghadabiyah dan syahwat. Kedua fakultas ini secara inheren untuk mempertahankan diri, demi memiliki relasi yang baik di tangan orang-orang baik dan sebaliknya kekuasaan di tangan orang-orang buruk akan menjadi ancaman.

Dalam filsafat klasik daya ghadabiah adalah daya untuk membela diri dan menguasai. Ini adalah daya yang harus diaktualkan oleh keberanian. Keberanian bagi masyarakat

Iran menjadi bagian dari kehidupan mereka ditempa oleh perjuangan yang luar biasa berat pengalaman dalam perang yang dipaksakan oleh Irak, perang dengan dunia dan sekarang perang dengan Israel dan Amerika.

Iran adalah negara yang tidak pernah dijajah dan tidak pernah memiliki hutang serta terkenal cinta dengan ilmu. Banyak para pemikir besar di dunia Islam itu berasal dari tanah Persia ini sebutlah misalnya Ibnu Sina ahli kedokteran terkenal, Suhrawardi, Imam Ghazali, Imam Bukhari, Abu Hanifah dan ilmuwan ilmunan lain. Para imam mazhab juga berasal dari tanah Persia ini. Iran juga adalah negara yang sering membantu negara-negara lain negara yang. Iran mementingkan altruisme bandingkan dengan Israel. Israel adalah negara teroris yang dipimpin oleh seorang tiran yang memiliki mimpi-mimpi yang aneh yang memanipulasi teologi Yahudi yang menyebabkan Yahudi menjadi negara yang dibenci oleh kaum muslimin di seluruh dunia.

Negara-negara Arab yang sebagiannya bekerja sama dengan Israel tidaklah mewakili masyarakat muslim yang sadar. Mereka adalah elit yang terlibat dengan kepentingan politik dan demi mempertahankan status politiknya melakukan apapun termasuk bekerja sama dengan yang dianggap musuh oleh kaum muslimin.

Peperangan ini atau konflik ini juga dilatarbelakangi oleh sumber daya manusia yang terbatas yang kemudian diperebutkan. Dalam konflik perang Iran Israel apa yang menjadi sumber daya yang terbatas adalah teknologi nuklir. Tidak semua negara bisa mengakses itu teknologi tinggi yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang memiliki kemampuan sains dan teknologi yang tinggi dan juga dana yang besar.

Sumber daya yang langka ini hanya dikuasai Israel. Israel memiliki kebebasan tanpa syarat. Tindakan sepihak ini

menimbulkan kecurigaan dari umat Islam bahwa Amerika memang melakukan diskriminasi dengan memberikan kebebasan kepada Israel dan membatasi kebebasan itu bagi negara-negara Islam termasuk Iran.

Israel adalah negara kecil dengan PDB lebih besar dari negara-negara sekitarnya dan kemudian teknologinya bisa menembus negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Ini menimbulkan konflik bukan semata-mata masalah ideologi tapi juga masalah yang sangat krusial bagi keamanan internasional.

Israel diistimewakan oleh Amerika dan sebagian besar dunia bahkan anehnya negara-negara Arab lebih mengistimewakan Israel. Israel dikecualikan dari syarat-syarat apapun yang memberatkan dunia Islam. Ini adalah bentuk ketidakadilan, maka terjadilah konflik karena Amerika dan sekutunya telah memberikan hak istimewa bagi Israel yang sebetulnya adalah kanker yang menggerogoti stabilitas Timur Tengah.

Perubahan terjadi terutama di masyarakat modern. Kalau dulu karena persoalan kepemilikan tanah, persoalan modal sekarang adalah persoalan otoritas kekuasaan. Mereka yang berkuasa akan melahirkan permusuhan dari kelompok-kelompok di bawahnya. Israel memiliki kekuasaan yang sangat tak terbatas. Israel mengandalkan Amerika, menggunakan teknologinya, menggunakan lobi-lobinya untuk menguasai Amerika dan termasuk negara-negara Islam. Ini menimbulkan konflik Karena kekuasaannya terlalu besar terlalu luas sehingga harus dibatasi dan dihentikan apalagi kekuasaan Israel merugikan negara-negara Islam (Mutawali 2023).

Pembahasan

Jika diperhatikan teori-teori konflik yang digunakan untuk membaca perang Iran Israel itu adalah teori sosial yang diderivasi dari fakta-fakta sosial di masyarakat Barat dan menggunakan metoda naturalisme (Khalil 2016). Masyarakat muslim memiliki perbedaan dengan masyarakat Barat dari berbagai sisi; pandangan hidup; paradigma, epistemologi dan nilai.

Teori-teori sosial (Rosidah 2011) culture itu juga melihat masyarakat dari sisi makro dari sisi luas jadi terkadang mengabaikan perilaku individu yang unik yang istimewa di dalam masyarakat tersebut dengan berbagai kecenderungannya seleranya pilihan hidupnya dan sebagainya. Teori-teori sosial dari barat itu juga membaca masyarakat dari aspek biologis bahwa masyarakat terdiri dari manusia-manusia biologis yang memang mencari sesuatu yang disenanginya dan menghindari sesuatu yang dibencinya. Kemudian juga dari aspek kekuasaan sosial, ekonomi, otoritas dan keistimewaan-keistimewaan yang berpotensi menciptakan konflik.

Dalam paradigma Islam, konflik itu mungkin terjadi ketika seseorang individu muslim masih di taraf di level hewani yang belum mengaktualkan level insani artinya dia masih manusia biologis di saat kondisi seperti itu mungkin terjadi konflik, bahkan perseteruan yang lebih buruk dari sekadar konflik emosi, tapi sudah mengarah ke konflik fisik senjata dan sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan dalam sumber-sumber tradisional Islam bahwa manusia mungkin mengalami kejatuhan ke level binatang bahkan ke level yang lebih rendah dari itu. jadi bisa dibayangkan bahwa individu muslim ketika jatuh ke level binatang bahkan level yang

lebih rendah akan melahirkan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan meskipun dia mengaku seorang muslim.

Namun bagi manusia yang sudah mengaktualkan dirinya maka yang terjadi bukanlah konflik tapi perlombaan kebajikan berlomba-lomba memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat, bagi ideologinya karena itu akan mendapatkan reward yang berharga dia akan mendapatkan value dan makna yang lebih tinggi daripada value yang sementara ini. Dari sudut pandang neurosains dan psikologi positif, tindakan “berlomba dalam kebaikan” dan kontribusi sosial yang tulus didorong oleh sistem reward intrinsik yang lebih dalam daripada sekadar kesenangan materi. Aktivitas seperti sedekah, menolong orang lain, dan menegakkan keadilan telah diteliti dapat mengaktifkan area otak yang terkait dengan kebahagiaan dan kepuasan (seperti striatum dan prefrontal cortex), mirip dengan yang diaktivasi oleh kesenangan duniawi, namun dengan efek yang lebih bertahan lama dan bermakna. Dalam kerangka Islam, ini adalah manifestasi dari “reward yang berharga” yang dijanjikan—sebuah ketenangan (sakinah) dan kepuasan existential (ridha) yang merupakan cerminan dari nilai dan makna tertinggi. Proses ini menguatkan bahwa aktualisasi diri sejati adalah ketika pencapaian spiritual individu selaras dengan kontribusi dan kebaikan bagi masyarakat luas, menciptakan siklus positif yang mengangkat derajat kemanusiaan individu dan kolektif.

Manusia pada hakikatnya memiliki berbagai potensi dan dorongan internal. Pada tingkat dasar, interaksi sosial seringkali diwarnai oleh persaingan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dapat memicu konflik. Namun, bagi individu yang telah mencapai tingkat perkembangan

psikologis yang lebih tinggi, yaitu mereka yang telah mengaktualisasikan dirinya, dinamika ini mengalami transformasi fundamental. Yang terjadi bukan lagi konflik destruktif, melainkan perlombaan dalam kebajikan.

Sebuah studi menemukan bahwa perilaku prososial—seperti menghabiskan uang untuk orang lain dan menjadi relawan—secara signifikan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan subjektif (*well-being*) dan penurunan gejala depresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memberi menciptakan siklus positif yang mendorong individu untuk terus memberi lagi (Aknin et al. 2012).

Di luar orang mungkin melihatnya seperti konflik seperti kasus antara KDM yang mempropagandakan kearifan lokal Sunda wiwitan dengan kelompok Islamis yang mempropagandakan Islam puritan. Namun kalau kita lihat dari paradigma Islam yang terjadi bukanlah konflik tapi KDM ini memberikan kontribusi alternatif pandangan baru yang lebih mengakar pada masyarakat Jawa Barat dan ternyata menurut KDM ini sebetulnya harmonis dengan Islam menawarkan ruang-ruang gagasan yang menarik yang akan menjadikan Islam itu sendiri sebuah entitas agama yang membumi sekaligus jaga melangit. Bagi para eksponen kearifan lokal, kelompok Islamis kadang-kadang tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat tertentu.

Manusia atau masyarakat menyempurnakan menjadi manusia ideal namun terkadang juga mengalami degradasi ketika fakultas hewaniyahnya mendominasi rasionalitasnya dan kemudian muncul konflik-konflik dengan orang lain, dengan teman, dengan institusi, dengan organisasinya bahkan konflik yang terbesar yang selalu terjadi selama hidupnya adalah konflik dengan dirinya musuh yang terbesar. Manusia harus melampaui ego instingnya yang

tidak mudah ada dua kepentingan dalam dirinya atau tiga atau banyak sehingga terjadi konflik atau peperangan sepanjang hidupnya. Manusia adalah sesuatu yang harus dilampaui.

Nietzsche, mengatakan, “Apakah yang telah kamu lakukan untuk melampauinya? ...Manusia adalah tali yang terbentang antara hewan dan Manusia-Atas—tali di atas jurang.” (Nietzsche 1883). Pascal mengatakan dengan optimis, “Manusia hanyalah sebuah buluh, yang paling lemah di alam, tetapi ia adalah buluh yang berpikir. Tidak perlu alam semesta mengangkat senjata untuk menghancurkannya: uap, setetes air, cukup untuk membunuhnya. Tetapi, sekalipun alam semesta menghancurkannya, manusia akan tetap lebih mulia daripada yang membunuhnya, karena ia mengetahui bahwa ia mati, dan mengetahui keunggulan alam semesta atasnya. Alam semesta tidak mengetahui apa-apa” (Pascal 2016).

Sigmund Freud, Bapak Psikoanalisis, secara eksplisit memetakan konflik jiwa ini dengan menyatakan, “Manusia bukanlah makhluk yang lembut, penuh kasih sayang, dan hanya membela diri ketika diserang; sebaliknya, ia juga pantas menyandang insting agresif yang kuat. Akibatnya, tetangga bukan hanya merupakan potensi penolong dan objek seksual baginya, tetapi juga seseorang yang menggoda untuk memuaskan agresinya padanya... untuk mengeksploitasi kapasitas kerjanya tanpa kompensasi, untuk memanfaatkannya secara seksual tanpa persetujuannya, untuk merebut miliknya, untuk mempermalukannya, untuk menyakitinya, untuk menyiksanya, dan membunuhnya” (Freud 1930).

Contoh teori sosial tentang konflik yang dianggap sesuai atau relevan untuk masyarakat Islam seperti bagaimana

menjelaskan gelombang protes sosial Arab spring di mana pemberontakan di Tunisia dan Mesir pada tahun 2011 tidak hanya dipicu oleh kemiskinan tetapi oleh kelas menengah pendidikan yang merasa frustrasi karena tidak mendapatkan pekerjaan dan kebebasan politik yang mereka harapkan. Mereka merasa aspirasi mereka diblokir oleh rezim yang korup. Ini sejalan dengan teori kesenjangan yang dirasakan atau teori deprivasi relatif jadi kesenjangan antara apa yang orang merasa berhak mendapatkan dan apa yang secara realistis bisa mereka capai menjadikan muncul perasaan tertinggal atau diperlakukan tidak adil inilah yang memicu kemarahan.

Teori lain yaitu teori pilihan rasional atau rasional choice theory di mana menurut teori ini yang ingin membongkar anggapan bahwa konflik terutama yang berlabel agama selalu bersifat irasional dan emosional. Jadi sebetulnya studi tentang pemilu di banyak negara muslim menunjukkan bagaimana kandidat secara rasional menghitung untung rugi dari penggunaan politik identitas untuk memenangkan suara bahkan kaum milisi atau kelompok politik sering kali menggunakan retorika agama atau sektarian secara strategis untuk memobilisasi massa demi mendapatkan dukungan mereka jadi mengobarkan konflik adalah pilihan nasional

Fenomena Sosial Universal sosial

Manusia menurut ahli sosiologi memiliki empat karakter utama (cardinal) yaitu survive, security, progressif dan prosperity. Keempat yang selalu dicari manusia. Konflik dalam pandangan ini mengacu pada empat kardinal tersebut. Karena survive yang terganggu atau security yang terancam dan ada halangan halangan yang mengganjal

dalam mencapai progressif dan prosperity. Konflik bisa juga karena benturan makna tentang kebanggaan, kemuliaan dan harga diri. Demi mempertahankan martabat dan harga diri masing masing pihak siap untuk terlibat dalam konflik regional atau internasional

Fenomena Sosial Masyarakat Islam

Pendekatan sosiolog barat gagal untuk memotret apa yang terjadi di tengah tengah masyarakat Islam, karena latar belakang penelitian mereka berdasarkan rujukan pada masyarakat modern barat dan juga metode yang mereka gunakan. Untuk dapat membaca teori sosial dan situasi sosial dalam konflik Iran -Israel , peneliti akan mengulitinya dari pandangan Ilahiyah dan nilai nilai yang menjadi asumsi asumsi dasar masyarakat muslim pada umumnya (Kaplick et al. 2019).

Pandangan dunia ilahiyah adalah keyakinan dan juga epistemologi yang dianut masyarakat ilmuwa Iran yang kemudian mengembangkan nilai, estetika dan sebagainya. Berbeda dengan pandangan dunia ilahiyah pandangan positivisme yang meyakini bahwa realitas itu materi dengan metode yang bisa diverifikasi oleh indra dan mengembangkan nilai yang paralel dengan postivis materialis yaitu yang berharga adalah materi, kekayaan atau yang dapat dijadikan uang. Yang baik yang menguntungkan dan yang buruk adalah yang merugikan secara materi.

Pandangan Dunia Ilahiyah (Yusefi-rad 2021) meyakini realitas itu bertingkat tingkat dari realitas yang konkrit material, berdimensi hingga realitas yang gayb yaitu Tuhan. Demikian realitas sosial, Murtadha Muthahhari mengembangkan realitas individual dan realitas sosial berdasarkan efek efeknya seperti yang dijelaskan oleh al-

Quran. Nilai yang dikembangkan berdasarkan paradigma yang berharga itu luas dari materi, non materi dan spiritual demikian juga terkait dengan nilai yang melahirkan etika.

Umat islam secara umum mengambil sumber etika atau sumber moral tentang kebaikan dan keburukan. Yang pertama yaitu divine command yang mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu bergantung kepada agama. Teori divine command ini dianut oleh semua agama-agama samawi baik islam kristen atau yahudi. Yang kedua baik atau buruk itu kalau ber implikasi baik atau berimplikasi buruk jadi kebaikan dan keburukan itu ditentukan oleh tujuan. Yang ketiga baik atau buruk itu diukur oleh karakter seseorang seseorang yang baik itu akan melahirkan kebaikan dan seseorang yang merupakan melahirkan keburukan ini yang disebut dengan virtue ethics. Yang keempat kebaikan dan keburukan itu tergantung kewajiban universal ini yang disebut deontologi moral.

Pada dasarnya, Islam menerima dan mengintegrasikan berbagai teori etika tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perang, kebaikan dan keburukan dipahami sebagai bagian dari perintah agama (Dabashi 2022), sebab agama dengan tegas menekankan bahwa kezaliman harus dilawan dan kejahatan harus diberantas. Dalam hal ini, bentuk nyata dari kezaliman dan kesewenang-wenangan dapat dilihat pada tindakan Israel dan Amerika Serikat (Takeyh 2006). Dengan demikian, perjuangan Iran pada dasarnya dimotivasi oleh nilai-nilai keagamaan. Jika dilihat dari perspektif utilitarianism, ukuran kebaikan dan keburukan ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Tujuan Iran dalam berperang adalah menegakkan kebajikan, menciptakan tatanan sosial yang adil, beradab, dan manusiawi. Selain itu, masyarakat muslim menolak adanya

dominasi mutlak satu pihak yang memiliki kekuasaan besar dan fasilitas berbahaya, terutama ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk menindas dan mengusir rakyat Palestina. Sementara itu, dari sudut pandang deontological ethics, Iran merasa memiliki kewajiban moral untuk mempertahankan diri dan melindungi kedaulatan negaranya dari berbagai ancaman, termasuk pembunuhan terhadap para jenderal dan pakar nuklir mereka.

Menuru Plato tidak hanya manusia yang harus beretika tapi juga negara. Etika negara adalah berpolitik. Politik dalam filsafat Islam merupakan bagian dari akal praktis, yaitu berbuat baik pada masyarakat yang lebih luas (Ali & Almulla 2023). Pada dasarnya, etika Islam adalah kebajikan semacam pronesis melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Iran adalah bangsa yang besar yang memiliki peradaban yang besar dan kaya dan memiliki para pemimpin yang besar dan bijak yang ditempa dengan berbagai peperangan dan pengalaman yang sangat banyak.

Islam sekarang telah menjadi bagian ideologi Iran dan Islam yang dipilih oleh mereka adalah Islam syiah yang memiliki ciri progresip, pembelaan atas kaum mustad'afin, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semangat heroik para pengikut Syiah sepanjang zaman yang selalu berhadapan dengan kegetiran dan penindasan dari para penguasa yang zalim.

Zaman seperti mengulang sejarah yang sama muncul tiranik yang lebih besar dari Yazid dan dari para penguasaan Bani Umayyah dan bani Abbasiyah yang kemudian dengan kekuasaan dan fasilitas menempati satu kawasan di mana tersebar negara-negara Islam. Di jantung masyarakat Islam dan di jantung wilayah-wilayah Islam bercokol satu kekuatan yang merampok wilayah strategis Islam

dan mengharu biru masjid suci al-Quds. Sejarawan Barat seperti Lord Acton (1834-1902) dengan sangat terkenal merumuskan pelajaran ini dalam kutipannya yang abadi: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut). Hegemoni modern hari ini, dengan kekuatan militernya yang mutlak dan seringkali bebas dari akuntabilitas internasional yang berarti (seperti hak veto di DK PBB), telah gagal memenuhi prinsip “oblige it to control itself”. Kekuatan tersebut tidak terkendali oleh hukum internasional yang adil.

Sebagai negara berdaulat dan islami dan memiliki kekuatan serta keberanian ideologis, negara ini tidak mungkin berdiam diri membiarkan kesewenang-wenangan merajalela dan tidak akan membiarkan mimpi mimpi liar mereka merusak tatanan dan kedaulatan Islam (Makmun et al. 2024).

Kesimpulan

Perang Iran Israel yang berlangsung sebentar dimenangkan oleh Iran. Iran sendiri melawan karena dengan alasan untuk membela diri. Argumentasi rasional dan dibenarkan oleh agama. Perang Iran Israel ini menarik jika diamati dengan lensa teori teori sosial barat dan Islam. Teori teori Barat tidak bisa menggambarkan secara mendalam dan luas fenomena perang pembelaan diri oleh masyarakat Islam. Masyarakat atau Negara Iran Islam memiliki paradigma dan nilai sendiri yang bersumberkan al-Quran, hadis dan akal yang melahirkan tindakan praktis untuk merespon berbagai kezaliman dan juga menawarkan konsep umat, jihad dan *Wilāyat al-Faqīh* yang saling melengkapi.

Konflik antara Iran dan Israel melampaui sekadar persaingan geopolitik bilateral; ia merupakan benturan kompleks yang mencakup dimensi ideologis, teologis, keamanan eksistensial, dan perjuangan untuk keadilan. Dari perspektif Tehran, konflik ini adalah perang defensif dan perlawanan (jihad) terhadap agresi dan pendudukan Zionis yang didukung AS, yang dibingkai dalam narasi Islam untuk membela kaum tertindas (*mustad'afin*) dan kemuliaan umat (ummah). Pendekatan teori sosial Barat yang sekuler dinilai tidak memadai untuk sepenuhnya memahami dinamika ini, karena masyarakat Muslim beroperasi berdasarkan paradigma Ilahiah yang nilai-nilainya bersumber dari wahyu.

Konsep-konsep kunci seperti *Wilāyat al-Faqīh* (otoritas ahli hukum), jihad, dan solidaritas ummah membentuk landasan ideologis Iran, membedakan perjuangannya dari sekadar perebutan kekuasaan tradisional. Konflik ini dipandang sebagai perlombaan dalam kebajikan (*fastabiqul khayrat*) untuk menegakkan keadilan, bukan sebagai konflik destruktif semata. Meski menggunakan teori realisme dan fungsionalisme untuk analisis, esensi konflik terletak pada upaya mengatasi ketidakadilan dan hegemoni, yang mencerminkan perjuangan universal melawan penyalahgunaan kekuasaan absolut yang cenderung korup, sebagaimana diperingatkan dalam sejarah pemikiran Barat sendiri.

Daftar Pustaka

- Abu-Nimer, M. 2003. *Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice*. Florida: University Press of Florida.
- Adler, E. 1997. "Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics." *European Journal of International Relations* 3 (3), 319-363.
- Afsaruddin, A. 2013. *Striving in the Path of God: Jihad and Martyrdom in Islamic Thought*. Oxford: Oxford University Press.
- Arjomand, S. A. 2009. *After Khomeini: Iran Under His Successors*. Oxford: Oxford University Press.
- Bayat, A. 2005. Islamisme dan Teori Gerakan Sosial. *Third World Quarterly* 26 (6), 891-908. <https://doi.org/10.1080/01436590500089240>.
- Cronin, S. Ed. 2021. *Anti-Veiling Campaigns in the Muslim World: Gender, Modernism and the Politics of Dress*. Princeton: Princeton University Press.
- Ehteshami, A., & Zweiri, M. 2021. *Iran's Foreign Policy: From Khatami to Ahmadinejad*. London: Ithaca Press.
- Esposito, J. L. 2010. *The Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Roomi, Farsad. 2023. "Konflik Iran-Israel: Penjelasan Ultra-Ideologis Kebijakan Timur Tengah." *Middle East Policy* 30 (2), 1-177.
- Felty, Stephen M. Monterey. 2019. *Conflict in Israel/Palestine*. California: Naval Postgraduate School.
- Furqon, S., Rachman, B. M., & Haq, M. Z. 2022. "Jalan menuju metafisika yang integral Syarah Al-Isyarat wa at-Tanbihat: Al-Ilahiyah." *Jaqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 7 (1), 34-60.

- Fuseini, *Teori Sosiologi dan Antropologi Tatanan Sosial dari Perspektif Islam*. Jurnal Ilmu
- Freud, Sigmund. 1930. *Civilization and Its Discontents*. Standard Edition, Vol. XXI. London: The Hogarth Press.
- Ahmed Rabiun Fuseini. 2021. "Sociological and Anthropological Theories of Social Order from Islamic Perspective". *IJUM Journal of Human Sciences (IJOHS)*, 3 (1), 34–47. <https://doi.org/10.31436/ijohs.v3i1.192>.
- Hashmi, S. H. Ed. 2014. *Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges*. Oxford: Oxford University Press.
- Huda, M., & Z. Qodir. 2022. "Narasi Eskatologis dan Konflik Geopolitik: Membaca Dinamika Timur Tengah Beyond Apocalyptic Framing." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26 (1), 78-95.
- Hufbauer, G. C., J. J. Schott, K. A. Elliott, & B. Oegg. 2007. "Economic Sanctions Reconsidered (3rd ed.). Peterson Institute for International Economics." *Journal of International Economics* 76 (1).
- Irawati, D., N. F. Natsir, & E. Haryanti. 2021. "Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif 'Epistemologi Islam'." *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4 (8), 870-880. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>.
- Kayhan, F. 2019. "The Role of Domestic Politics in Iranian Foreign Policy towards Israel." *British Journal of Middle Eastern Studies* 46 (5), 798–815.
- Khatib, L. 2011. *Islamic Revivalism in Syria: The Rise and Fall of Ba'thist Secularism*. London: Routledge.

- Körner, A., & R. Deutsch. 2022. "Deontologi dan Utilitarianisme dalam Kehidupan Nyata: Serangkaian Dilema Moral Berdasarkan Peristiwa Sejarah." *Personality and Social Psychology Bulletin* 49 (10), 1511-1528. <https://doi.org/10.1177/01461672221103058>.
- Louër, L. 2021. *Sectarianism and International Relations: Iran and the Middle East*. London: Hurst & Company.
- Mandaville, P. 2014. *Islam and Politics* (3rd ed.). London: Routledge.
- Manilet, M. Jamil, dan Farhan Afif Al Kindi. 2024. "Paradigma Benturan: Respon Terhadap Penggeseran Paradigma Islam: Benturan Paradigma: Respon Terhadap Pergeseran paradigma Islam". *Jurnal Studi Islam dan Barat* 2 (1): 1-21. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.34>.
- Mearsheimer, J. J., & S. M. Walt. 2006. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. *London Review of Books* 28 (6).
- Nietzsche, Friedrich. 1883. *Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None*. New York: Penguin Books.
- Prasetyono, E. 2020. "Dinamika Konflik Iran-Israel dan Implikasinya bagi Stabilitas Timur Tengah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 24 (2), 123-140.
- Putnam, R. D. 1988. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." *International Organization* 42 (3), 427-460.
- Raas, W., & A. Long. 2007. "Osirak Redux? Assessing Israeli Capabilities to Destroy Iranian Nuclear Facilities." *International Security* 31 (4), 7-33.
- Ramadan, T. 2003. *Western Muslims and the Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press.

- Sabet, F. 2012. "The Islamic Republic of Iran: A Case of Revolutionary Transformation and Continuity." *Middle East Critique*, 21 (1), 5-24.
- Takeyh, R. 2006. "Iran, Israel, dan Politik Terorisme." *Survival* 48 (4), 83-96. <https://doi.org/10.1080/00396330601062691>.
- Ilyas, Wajeeha, Aaliaba Sajjad, & Hanna-e-Kalbi. 2024. "Colonial Legacies and Modern Struggles: Humanitarian Impacts in the Iran-Israel Conflict." *JQSS: Journal of Quranic and Social Studies* 4 (1), 15-36.
- Walt, S. M. 1987. *The Origins of Alliances*. New York: Cornell University Press.
- Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing.
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics." *International Organization* 46 (2), 391-425.
- Wiktorowicz, Q. 2002. "Aktivisme Islam dan Teori Gerakan Sosial: Arah Baru Penelitian." *Politik Mediterania* 7 (3), 187-211. <https://doi.org/10.1080/13629390207030012>.
- Pascal, Blaise. 2016. *Pensées (Thoughts)*. Soviet: Samizdat.